

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Cara penghitungan pajak royalti untuk profesi penulis di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang hanya terletak pada pengurang pajak yang ditetapkan sebelum dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara. Pengurang pajak di Indonesia berasal dari Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebesar 50% untuk penulis dengan pendapatan di bawah 4,8 miliar pertahun dan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikurangkan dari penghasilan netto sebelum dikalikan dengan tarif progresif PPh 21. Meninjau lebih lanjut hal tersebut, PPh 23 untuk royalti yang telah dibayar dan disetorkan terlebih dahulu oleh penerbit harus diperhatikan kembali terkait kredit pajaknya. Apabila kredit pajak tersebut bernilai lebih tinggi daripada pajak terutang yang dihitung sendiri oleh penulis, maka penulis dapat berhak mengajukan pengembalian kelebihan pajak yang dibayarkan kepada negara.

Berkaitan dengan pembayaran pajaknya, penulis di Indonesia sebenarnya diuntungkan karena meskipun tampak seperti membayar dalam jumlah besar, penulis dapat mengajukan pengembalian kelebihan pajaknya kepada negara. Penulis di Indonesia juga diuntungkan dalam hal ketetapan pengurang pajak terutangnya karena di negara-negara yang menjadi pembanding, pengurangan pajak bergantung pada pertimbangan terkait dengan aspek-aspek yang digunakan sewaktu riset dalam mencari isi dari konten yang akan ditulis, sehingga jumlahnya bersifat tidak tetap dan berbeda-beda untuk setiap penulis. Jika dibandingkan

dengan ketidakpastian di negara-negara yang menjadi pembanding, pengurang pajak untuk penulis di Indonesia lebih jelas dan pasti karena besar NPPN dan PTKP sudah ditetapkan oleh negara. Berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, masalah yang sempat terjadi di Indonesia terkait dengan pajak royalti untuk penulis disebabkan oleh kesalahan konsep dalam penghitungan pajak terutang yang terlanjur beredar di masyarakat. Ketimbang dirugikan, penulis sebenarnya diuntungkan oleh ketentuan pajak yang berlaku.

Pembayaran dan penyetoran pajak untuk profesi penulis di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris umumnya dilakukan melalui sistem elektronik, sedangkan pembayaran dan penyetoran pajak di Jepang dapat dilakukan secara langsung pada Kantor Pajak yang tersedia di masing-masing wilayah. Di Indonesia dan Jepang, penulis harus melaporkan formulir yang merincikan kewajiban pajaknya secara berkala kepada kantor pajak di masing-masing negara. Formulir pelaporan yang digunakan di Indonesia adalah SPT 1770 sedangkan di Jepang adalah Formulir B. Amerika Serikat dan Inggris sama-sama tidak mengharuskan pelaporan pajak dilakukan oleh penulis. Di Amerika Serikat, terdapat Formulir W-4, tetapi formulir tersebut tidak dilaporkan kepada *Internal Revenue Service* (IRS) yang bertugas menangani pajak federal domestik. Formulir tersebut digunakan untuk membantu penulis melacak pendapatan yang diterimanya selama satu tahun agar mempermudah penghitungan pajak terutangnya dan hanya dikirimkan jika penulis ingin mengajukan penurunan atau keringanan pajak terutang. Di Inggris sendiri tidak ada pelaporan pajak khusus setelah pembayaran dan penyetoran pajak terutang. Satu-satunya pajak yang harus

dilaporkan merupakan pajak untuk penerima pensiun yang terdaftar di pemerintah. Pelaporan ini dikirimkan menggunakan Formulir SA970.

## **6.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis telah diusahakan untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur ilmiah yang berlaku, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Adanya beberapa perubahan peraturan terkait dengan pajak royalti yang berlaku di Inggris, sehingga informasi yang berkaitan tentang perubahan terbaru di negara yang bersangkutan masih dalam tahap penyempurnaan.
2. Beberapa *website* pemerintahan terkait dengan ketentuan dan peraturan pajak di luar negeri membutuhkan nomor identitas untuk diakses sehingga peneliti kurang mendapatkan informasi yang mendalam.

## **6.3. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis sebaiknya meninjau kembali tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan norma pembayaran pajak tertentu agar tidak ada kesalahpahaman lagi terkait dengan sistem pembayaran pajak untuk penulis.
2. Masyarakat sebaiknya meninjau dan menelaah kembali masalah terkait dengan pajak penulis di Indonesia dan aktualitasnya yang sempat

ramai di media cetak maupun elektronik agar tidak ada lagi kesalahpahaman atau miskonsepsi terhadap peraturan yang berlaku.

3. Penerbit dapat mencoba membayarkan hak-hak penulis paling lambat satu atau dua bulan setelah buku tersebut terbit sesuai dengan jumlah yang telah dicetak oleh penerbit seperti yang dilakukan oleh Negara Jepang. Hal ini untuk mengurangi ketidakpastian penulis akan pembayaran royalti mereka.
4. Untuk penelitian selanjutnya, ada baiknya untuk menambahkan studi kasus dari berbagai sudut pandang dan perbandingan terkait dengan topik yang dibahas.

